

FORMULASI KEBIJAKAN SEJARAH PRA KEMERDEKAAN RI

HISTORY POLICY FORMULATION PRE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Benny Syofyan Ahmad, Adianto, Febri Yuliani

Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru

*Koresponden email: benny_syofyan@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sejarah pra kemerdekaan RI di Kota Dumai. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kajian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada upaya investigasi dan pengkajian secara natural fenomena yang terjadi dalam keseluruhan kompleksitasnya. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan Formulasi Kebijakan Sejarah Pra Kemerdekaan RI di Kota Dumai sudah berjalan. Hal ini karena dilihat dari 5 (lima) tahapan penelitian kebijakan yang dikemukakan Ann Majchrzak, yaitu persiapan, konseptualisasi studi, analisis teknikal, perumusan rekomendasi dan mengkomunikasikan hasil studi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa faktor penghambat dalam memformulasikan kebijakan tersebut adalah kuantitas dan kualifikasi aparaturnya yang belum memadai dan sistem penjadwalan anggaran di pemerintahan.

Kata kunci: Formulasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Kota Dumai

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and analyze the formulation of the policy on the history of Indonesian independence in the city of Dumai. The type of research chosen is qualitative research with a phenomenological approach. Qualitative studies are research that focuses more on investigating and assessing natural phenomena that occur in their overall complexity. Data collection techniques from this research are interviews, observation and documentation. The results of this study found that the Pre-Independence History Policy Formulation of the Republic of Indonesia in Dumai City was already running. This is because it is seen from the 5 (five) stages of research proposed by Ann Majchrzak, namely preparation, study conceptualization, analysis techniques, recommendations and communication of study results. The results of this study also found that the inhibiting factors in formulating the policy were the insufficient quantity and qualification of the apparatus and the government budget scheduling system.

Keywords: Policy Formulation, Public Policy, Dumai City

PENDAHULUAN

Berbagai cerita asal usul Dumai yang berkembang masyarakat jika ditelusuri lebih lanjut kebanyakan berasal dari opini atau imajinasi orang-perorangan yang kemudian beredar di masyarakat. Pembuktian cerita tersebut kebanyakan hanya berdasarkan “*fakta dari terawang gaib*”, atau “*cerita dari kakek saya*”, atau “*bukti fisik*” berupa koin tua atau barang pecah belah yang tidak memiliki identitas atau keunikan khusus yang membedakannya dari berbagai barang yang dapat ditemukan di berbagai tempat.

Beberapa cerita tersebut diantaranya mengenai cerita yang menyatakan bahwa dulunya di Kota Dumai terdapat sebuah kerajaan yang disebut sebagai Kerajaan Sri Bunga Tanjung, namun mengenai kapan, siapa serta bukti artefak

mengenai kerajaan tersebut hingga saat ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Cerita lainnya adalah mengenai nama Dumai berasal dari “*di’Umai*” yang mengisahkan tentang pangeran dari negeri aceh yang tidak sengaja bertemu seorang putri cantik jelita dan tempat pertemuan tersebut adalah di’Umai. Masih banyak kisah dan versinya lainnya tentang Dumai, baik cerita Umai sebagai asal muasal Dumai, atau cerita mengenai Dumai dari kata “*damai*” yang menceritakan perdamaian atas perang antara aceh dan kerajaan di Dumai, dan lain sebagainya.

Terlepas dari perdebatan mengenai cerita asal muasal nama Dumai yang muncul di masyarakat, hingga saat ini tidak diketahui kapan nama dan kawasan Dumai mulai terbentuk. Penelusuran mengenai asal-muasal Dumai dalam

perspektif histografis tidak dapat atau masih sulit dilakukan jika didasarkan atas cerita asal muasal yang berkembang di masyarakat oleh sebab hingga saat ini belum ada penelitian antropologis yang mengkhususkan hal-hal mengenai keaslian cerita-cerita tersebut khususnya apakah cerita tersebut merupakan hasil adopsi dari cerita rakyat yang berkembang di daerah-daerah sekitar yang keberadaannya jauh lebih tua (misalnya Bengkulu, Siak, dan lainnya) atau merupakan cerita asli masyarakat tempatan yang disampaikan secara turun temurun.

Ragam kisah dongeng sejarah yang dipercaya masyarakat pasca 1954 kemudian oleh para kalangan berikutnya dianggap sebagai bahan heuristik untuk pengkajian dan penguraian sejarah Dumai. Beberapa pihak kemudian mencoba menguraikan sejarah Dumai dari Kisah Dongeng tersebut secara “historiografis”, dan selanjutnya “historiografis” tersebut digunakan di Pemerintah Kota Dumai sebagai sejarah resmi di Kota Dumai. Akibatnya dapat dikatakan hingga saat kajian ini dibuat, sejarah yang diketahui oleh masyarakat dan pemerintah tempatan sebenarnya adalah “sejarah dongeng” yang sama sekali tidak berhubungan dengan ragam peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Kota Dumai dan sekitarnya.

Pada sisi lain, kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan implementasi sejarah khususnya kebijakan di tingkat lokal pada akhirnya menjadi tidak jelas dan tidak terarah. Beberapa kebijakan terkait sejarah di bidang sosial, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan ketika mengacu kepada “sejarah dongeng” tersebut pada awalnya terkesan tidak terdapat masalah. Namun ketika “sejarah dongeng” di Kota Dumai tersebut di sandingkan dengan sejarah berbagai wilayah di sekitarnya maupun dengan kronologi sejarah nasional dan internasional, tidak satupun “fakta” dari “sejarah dongeng” tersebut sesuai dan sejalan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi di sekitar atau di luar wilayah Kota Dumai.

Sebagai misal, versi “sejarah Dongeng” di Kota Dumai menyebutkan tentang keberadaan Kerajaan Pamalayu (dalam versi lain disebut juga kerajaan Sri Bunga Tanjung) yang dipimpin oleh Syaikh Sayyid Aziz Ibrahim sebagai raja dari tahun 1776 sampai tahun 1858. Syaikh Sayyid Aziz Ibrahim adalah ayahanda dari tokoh-tokoh tujuh putri dalam kisah “Putri Tujuh” yang sangat terkenal di masyarakat Kota Dumai. Sebaliknya, keberadaan kerajaan dan raja dari Kerajaan

Pamalayu (Sri Bunga Tanjung), ketika dikomparasikan dengan fakta-fakta sejarah yang termuat dalam berbagai catatan sejarah, terlihat jelas ketidakbenaran keberadaan kerajaan dan raja dari versi sejarah yang diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah di Kota Dumai. Sebabnya, pada periode yang sama sesuai dengan catatan sejarah, kerajaan yang berkuasa di wilayah Kota Dumai sekarang ini adalah kerajaan Kesultanan Siak Sri Indra Pura. Inilah contoh penyimpangan sejarah yang telah terjadi di Kota Dumai, Penyimpangan yang bertentangan dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Beberapa kawasan yang diduga merupakan penyimpangan sejarah yang ada antara lain: a) Kawasan Konservasi Bandar Bakau; b) Kawasan Pemakaman Datuk Kedondong. Ketidakjelasan dan penyimpangan mengenai sejarah di Kota Dumai merupakan persoalan serius dan berdampak fatal bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Dumai. Banyak persoalan di kebijakan pemerintah tempatan yang timbul akibat ketidakjelasan dan penyimpangan sejarah ini diantaranya seperti: a) Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya terkait pendidikan mengenai sejarah lokal mengakibatkan banyak generasi muda di Kota Dumai menjadi sesat dalam hal pengetahuan sejarah; b) Kebijakan pemerintah di bidang kebudayaan khususnya dalam penetapan kawasan cagar budaya dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan cagar tersebut menjadi salah sasaran dan berujung kepada pemborosan uang negara. c) Kebijakan pemerintah di bidang sosial khususnya dalam penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial dari ragam peristiwa penting yang telah terjadi di Kota Dumai menjadi salah arah oleh sebab acuan sejarah yang digunakan tidak cocok dengan muatan sejarah nasional maupun internasional.

Beberapa persoalan di atas sebenarnya sebagian contoh dari rangkaian persoalan yang ditimbulkan oleh kesalahan atau penyimpangan dalam merumuskan sejarah di lingkungan pemerintah daerah. Jika ditelusuri lebih jauh persoalan dan dampak yang ditimbulkan sebenarnya akan terlihat jelas bahwa kompleksitas dan dampak negatif dalam perspektif sosial budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup jauh lebih besar dari yang tergambar dalam contoh diatas. Namun oleh sebab kajian ini difungsikan sebagai solusi awal dari ragam persoalan tersebut, maka prioritas utama adalah merencanakan kebijakan imple-

mentatif atau terapan yang relevan dengan bidang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) instansi teknis khususnya instansi Diskominfo Kota Dumai dalam menyikapi pelurusan sejarah yang ada di Kota Dumai. Rencana Kebijakan ini dirancang sebagai agar dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan daerah, sehingga pada akhirnya ragam kebijakan terdahulu dapat segera diperbaiki dan dampak negatif akibat kesalahan sejarah tersebut dapat dikurangi atau dihentikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kajian dalam tesis ini, sesuai dengan judul “Formulasi Kebijakan Sejarah Pra Kemerdekaan Ri Di Kota Dumai”, akan difokuskan untuk menganalisa bagaimana proses dan mekanisme kebijakan di Dinas Kominfo Kota Dumai dalam menanggapi upaya pelurusan sejarah yang saat ini gencar dilakukan di Kota Dumai. Persoalan pelurusan sejarah merupakan hal yang pertama kali terjadi sejak Dumai dibentuk sebagai Kota pada tahun 1999. Untuk itu ruang lingkup kajian dalam tesis ini akan dibatasi dalam perspektif penerapan kebijakan berdasarkan peraturan cagar budaya di Dinas Kominfo Kota Dumai, sebab implementasi kebijakan untuk pelurusan sejarah merupakan wacana yang berdampak luas dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.

METODE

Penelitian ini menguraikan rangkaian isu kebijakan yang akan dianalisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Dengan metode ini diharapkan mampu menggali informasi yang sesuai gambaran kondisi, objek, atau fenomena sosial saat dilakukan penelitian. Dalam proses analisis wacana, eksplorasi dikembangkan berdasarkan sensitifitas dari berbagai fungsi dan kepentingan pelurusan sejarah daerah yang terkait langsung dengan berbagai wacana empiris di daerah sasaran penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas korelasi berbagai potensi kebijakan daerah dalam mekanisme kebijakan nasional terhadap pelurusan sejarah daerah di Kota Dumai.

Kajian ini mengedepankan berbagai konsep sinergitas kebijakan yang mengacu kepada kondisi dan karakteristik daerah untuk kemudian disinkronisasikan dengan berbagai fungsi dan kepentingan pelurusan sejarah daerah lokal yang. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti dan dilaporkan

secara sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdebatan mengenai cerita asal muasal nama Dumai yang muncul di masyarakat, hingga saat ini tidak diketahui kapan nama dan kawasan Dumai mulai terbentuk. Penelusuran mengenai asal-muasal Dumai dalam perspektif histografis tidak dapat atau masih sulit dilakukan jika didasarkan atas cerita asal muasal yang berkembang di masyarakat oleh sebab hingga saat ini belum ada penelitian antropologis yang mengkhususkan hal-hal mengenai keaslian cerita-cerita tersebut khususnya apakah cerita tersebut merupakan hasil adopsi dari cerita rakyat yang berkembang di daerah-daerah sekitar yang keberadaannya jauh lebih tua (misalnya Bengkulu, siak, dan lainnya) atau merupakan cerita asli masyarakat tempatan yang disampaikan secara turun temurun.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan implementasi sejarah khususnya kebijakan di tingkat lokal pada akhirnya menjadi tidak jelas dan tidak terarah. Beberapa kebijakan terkait sejarah di bidang sosial, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan ketika mengacu kepada “sejarah dongeng” tersebut pada awalnya terkesan tidak terdapat masalah. Namun ketika “sejarah dongeng” di Kota Dumai tersebut di sandingkan dengan sejarah berbagai wilayah di sekitarnya maupun dengan kronologi sejarah nasional dan internasional, tidak satupun “fakta” dari “sejarah dongeng” tersebut sesuai dan sejalan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi di sekitar atau di luar wilayah Kota Dumai.

Persiapan

Aktivitas-aktivitas utama pada persiapan awal (*preliminary activities*) mengarah pada satu tujuan, yaitu diperolehnya informasi memadai untuk menentukan fokus studi penelitian kebijakan pendidikan. Informasi yang cukup menjadi titik awal keberhasilan proses kerja penelitian. Informasi-informasi awal ini diperoleh dari narasumber yang memberikan informasi tentang bagaimana asal muasal kegiatan formulasi yang dilakukan pemerintah Kota Dumai. Rangkaian informasi tersebut secara berurutan mulai dikumpulkan berdasarkan wawancara

kepada penulis buku jejak waris buluh bohal untuk mengetahui apa penyebab kegiatan formulasi kebijakan dilakukan berdasarkan perspektif referensial; informasi dari penggiat sejarah untuk mengetahui bagaimana perkembangan wacana dikalangan masyarakat, khususnya media sosial facebook yang sering digunakan masyarakat untuk bertukar informasi; informasi dari kelompok masyarakat (Masyarakat Raja Laut) khususnya yang merupakan keturunan Datuk Laksamana untuk mengetahui sikap dan tanggapan keturunan terhadap sejarah yang beredar dimasyarakat terutama sejarah putri tujuh, sejarah pamalayu maupun sejarah kerajaan sri bunga tanjung; dan informasi dari Pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai untuk mengetahui respon pemerintah terhadap adanya informasi sejarah yang menjadi polemik dimasyarakat.

Hal yang disampaikan narasumber diatas sangat menarik mengindikasikan adanya persoalan-persoalan empiris yang ditemukan penulis ketika menulis bukunya. Kendala empiris tersebut diantaranya seperti kurangnya data lokal untuk memverifikasi konteks-konteks "sejarah" yang beredar dan dipercayai masyarakat dan pemerintah tempatan. Distorsi sejarah dalam pengetahuan lokal yang menghilangkan jejak peristiwa penting juga merupakan kendala lainnya yang dialami penulis. Kendala selanjutnya yang ditemukan adalah kecenderungan individu di masyarakat tempatan untuk menambah, mengurangi atau mengarang suatu peristiwa yang kemudian disebut sebagai peristiwa "sejarah". Kendala terakhir, ketiadaan jejak fisik dari berbagai peristiwa penting yang secara tertulis dapat ditemukan dalam berbagai catatan sejarah namun kondisi lokal tidak memungkinkan jejak tersebut untuk ditemukan kembali.

Media sosial Grup Facebook "Sejarah Dumai" merupakan bagian dalam pelaksanaan Keputusan Walikota Dumai Nomor 519/HK-HAM/2016 tentang Penetapan Tema dan Judul Riset Sejarah Kota Dumai. Guna mendapatkan berkas-berkas yang memiliki isi berkaitan masa lalu di Kota Dumai, berupa foto lingkungan, foto acara, berkas SK Pelantikan (bagi aparatur), surat menyurat, dan lainnya. Polemik sejarah yang dapat ditemukan dalam diskusi di media sosial Grup Facebook "sejarah Dumai" diantaranya adalah tentang raja pamalayu yang kuburannya dibangun oleh pemerintah kota Dumai tahun 2014.

Polemik sama juga dapat ditemukan dalam group facebook lainnya yang membahas sejarah terkait negeri bukit batu, dalam hal ini adalah group facebook sejarah bengkalis. Berdasarkan wawancara dengan pengelola group facebook sejarah bengkalis penyimpangan sejarah tidak hanya terjadi di kota Dumai namun juga terjadi di kabupaten bengkalis. Dari informasi dari narasumber diperoleh kesimpulan bahwa terdapat kecenderungan di masyarakat untuk memanipulasi sejarah berdasarkan kepentingan pribadinya seperti kepentingan popularitas, politik, dan kepentingan untuk klaim tanah. Inilah yang menyebabkan banyak distorsi sejarah yang terjadi di kota Dumai dan kabupaten bengkalis

Pengetahuan mengenai sejarah di lingkungan pemerintah hanya terbatas berdasarkan apa yang telah diakui oleh pemerintah pada masa sebelumnya, terutama berdasarkan keternagan sejarah yang tercantum dalam buku saku pembentukan kota Dumai yang diterbitkan pada tahun 1999, yakni pada saat peresmian Dumai menjadi kota madya TK II pada tanggal 27 april 1999. Buku saku ini disusun hanya berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber perorangan dan tidak diverifikasi berdasarkan metodologi heustografi.

Tahap persiapan terbentuknya formulasi kebijakan sejarah Kota Dumai terpicu oleh adanya polemic-polemik social yang berkembang di masyarakat tempatan, khususnya mengenai keabsahan kisah sejarah yang saat ini beredar. Polemik sejarah yang menjadi isu social tersebut merupakan pendorong utama bagi pemerintah tempatan untuk mempersiapkan berbagai rumusan kebijakan yang dipandang untuk menjadi solusi terhadap masalah tersebut. Polemik Sejarah yang menjadi wacana kebijakan merupakan isu baru dalam perumusan kebijakan di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Akibatnya kebijakan yang dibangun selama ini tidak dapat dijadikan referensi bagi pemerintah tempatan. Dengan demikian formulasi kebijakan untuk polemic sejarah di Kota Dumai akan cenderung bersifat parsial dalam implementasinya. Dengan kata lain kebijakan tersebut masih bergantung kepada perspektif (sudut pandang) masing-masing dinas yang memiliki hubungan dengan wacana sejarah.

Konseptualisasi studi

Konseptualisasi studi adalah proses pembentukan konsep dengan bertitik tolak pada kajian-kajian kepustakaan yang relevan dari ma-

salah yang diteliti. Dalam tahapan konseptualisasi studi penelitian kebijakan sejarah, informasi yang diperlukan dimanfaatkan untuk kepentingan mengembangkan preliminary model (paradigm penelitian). Untuk memperjelas paradigma dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber dari tim identifikasi calon tokoh sejarah yang dibentuk oleh Dinas Sosial sebagai data sekunder.

Walaupun tim tidak ditugaskan menelusuri sejarah Dumai namun dalam proses pelaksanaan tugasnya tim tersebut jelas harus menentukan terlebih dahulu mana yang dimaksud dengan sejarah Dumai agar tokoh-tokoh dalam sejarah tersebut dapat diidentifikasi. Oleh sebab dalam tim tersebut juga ada penulis dari jejak waris buluh bohah negeri bukit batu maka jelaslah acuan referensial tim adalah keterangan dalam buku tersebut. Hal ini menunjukkan tokoh-tokoh yang diidentifikasi tim tidak terlepas dari penelusuran berdasarkan kronik melayu dan berbagai catatan eropa lainnya. Sebab sebagaimana keterangan dari penulis buku jejak waris buluh bohah, rangkaian sejarah yang dipaparkan dalam buku tersebut mengacu kepada bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam kronik melayu dan berbagai catatan eropa, bukan berdasarkan cerita orang perorangan di masa kini yang kebenarannya sulit dipastikan.

Sesuai dengan keterangan dari tim berdasarkan keputusan walikota, terlihat jelas adanya perbedaan tokoh-tokoh yang diidentifikasi oleh tim dengan tokoh-tokoh yang diketahui masyarakat setempat. Beberapa tokoh yang diidentifikasi tim dan dapat diverifikasi kebenarannya adalah mamdarim rupa sesuai dengan catatan Tome Vires (1512-1515), Seri Amar Bangsa sebagaimana tercatat dalam Sulalatus Salatin yang dipercaya merupakan karangan Tun Seri Lanang pada tahun 1613, Penghulu Dumai Seri Amar wangsa atau Tengku Perang sebagaimana tercatat di syair perang siak. Datuk Laksamana Encik Kamis sesuai keterangan dalam catatan Nieuwenhuyzen (1858) netscher (1862) dan gramberg (1864). Sebaliknya tokoh yang dikenal masyarakat sebagian besar adalah tokoh yang bersumber dari kisah-kisah yang disampaikan oleh orang perorangan ketika dumai mulai berkembang sebagai kota pelabuhan pada sekitar tahun 1957, yakni ketika chevron membangun dermaga untuk transportasi minyak. Cerita orang perorangan ini dikumpulkan oleh chevron kemudian dicatat kembali oleh pihak Pertamina ketika akan membangun unit pengo-

lahan minyak pada decade 1970-an. Tokoh-tokoh dari cerita orang perorangan tersebut diantaranya seperti kisah putri tujuh yang mati terkubur ketika dumai diserang pasukan Aceh, kisah tentang Siti Laut, Kisah tentang Pangeran Aceh yang terbunuh oleh buah belukap (buah dari Phon Bakau). Tidak satupun kisah dari orang perorangan tersebut dapat diverifikasi kebenarannya.

Sesuai dengan keterangan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai menunjukkan bahwa upaya Dinas untuk meminta Salinan temuan tim serta fasilitasi ekspose sebagaimana tersebut diatas merupakan bukti bahwa Dinas mengakui adanya penyimpangan dalam sejarah Kota Dumai. Upaya Dinas ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah kota dumai untuk meluruskan sejarah Dumai yang sebelumnya tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Namun untuk mewujudkan upaya tersebut pemerintah tempatan memerlukan adanya rencana-rencana kebijakan yang sistematis dan sesuai dengan kerangka regulative.

Wacana pelurusan sejarah membutuhkan adanya rujukan dari Buku, Pandangan Kelompok Masyarakat, Polemik yang ada (Group "sejarah Dumai") dan pengetahuan aparaturnya untuk disinkronisasikan dengan pendapat tim untuk dijadikan rencana-rencana kebijakan yang menjadi upaya diskominfo dan selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis teknikal.

Analisis Teknikal

Analisis data atau informasi yang diperoleh selama penelitian dapat dilakukan dengan cara, yaitu analisis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian kebijakan dan rekomendasi penelitian yang optimal. Pemerintah Kota Dumai akan menindaklanjuti polemik kebenaran sejarah di Kota Dumai yang saat ini menjadi wacana publik setelah melakukan analisis terhadap expose tim dan buku jejak buluh bohah Dalam perspektif analisis teknikal, mengacu kepada informasi dari narasumber, uapa yang direncanakan Diskominfo dengan mengakomodir rencana ekspose dari tim identifikasi calon tokoh sejarah daerah merupakan langkah yang tepat untuk memverifikasi polemik sosial yang hendak dijadikan isu kebijakan.

Rencana tidak lanjut diskominfo untuk segera mengisukan polemik ini sebagai wacana kebijakan kepada walikota Dumai dapat disimpulkan sebagai bentuk penerapan tindak lanjut suatu kebijakan dalam hirarki birokrasi peme-

rintah, yakni dinas bertindak sebagai pembantu walikota dalam merumuskan kebijakan dan walkota bertindak sebagai atasan bertindak untuk mengambil keputusan terhadap kebijakan yang dirumuskan. Namun dalam proses perumusan sampai penetapan kebijakan tersebut memerlukan waktu yang panjang oleh sebab polemic sejarah yang menjadi isu kebijakan memerlukan langkah-langkah sosialisasi sistematis dan bertahap agar distorsi sejarah yang telah terjadi tidak lagi menimbulkan kebingungan dimasyarakat dan setiap tahapan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal anggaran yang tersedia.

Perumusan Rekomendasi

Pemerintah Kota Dumai melalui Diskominfo akan mengupayakan terbentuknya Produk hukum daerah berkaitan dengan pelurusan sejarah dalam ruang lingkup kewenangan diskominfo, berupa Rancangan Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim evaluasi dan Sosialisasi Sejarah, Rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan sejarah kota Dumai, Rancangan Keputusan Walikota tentang pembentukan tim cagar budaya (lintas instansi). Rancangan keputusan walikota merupakan rancangan mengenai tim lintas instansi yang terdiri dari Instansi Diskominfo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial serta Instansi pemerintah lainnya seperti Veteran Republik Indonesia, TNI dan POLRI. Tim ini dikhususkan untuk mengevaluasi hasil temuan tim identifikasi calon tokoh sejarah sekaligus mensosialisasikan tokoh-tokoh tersebut sebagai bagaimana upaya pelurusan sejarah kota Dumai.

Kemudian Rancangan Keputusan Walikota tentang Penetapan sejarah Kota Dumai merupakan penetapan regulative sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri dalam negeri tentang pembentukan produk hukum daerah. Langkah ini dilakukan oleh sebab penyimpangan sejarah yang telah terjadi sebelumnya telah menyebabkan pemerintah kota Dumai salah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan terkait sejarah khususnya dalam alokasi anggaran untuk pembangunan kawasan-kawasan yang selama ini dipercaya sebagai kawasan sejarah. Keputusan penetapan ini difungsikan untuk menghentikan seluruh kegiatan yang sudah terlanjur salah sebelumnya dan sekaligus sebagai langkah awal untuk membangun kebijakan baru terkait sejarah berdasarkan fakta-fakta yang dapat diverifikasi kebenarannya.

Setelah keputusan-keputusan Walikota sebagaimana tersebut diatas, naesumber menerangkan kepada penulis bahwa pemerintah kota Dumai akan membuat Rancangan Peraturan Walikota tentang penetapan media sosialisasi sejarah kota Dumai yang terdiri dari Situs / Website sejarah Kota Dumai, Museum, Cagar Budaya. Peraturan Walikota ini berfungsi sebagai legalitas tempatan untuk membangun kebijakan-kebijakan baru yang berhubungan dengan sejarah yang telah diverifikasi sekaligus sebagai langkah nyata pemerintah setempat untuk meluruskan sejarah serta menghentikan berbagai polemic yang sebelumnya terjadi di masyarakat. Kemudian Pemerintah Kota Dumai juga akan menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang sejarah kota Dumai yang memuat Sejarah resmi yang diberlakukan di lingkungan kota Dumai, Tata cara perubahan wacana sejarah, dan Evaluasi Kebenaran Sejarah. Rancangan yang terakhir ini difungsikan sebagai regulasi untuk tindakan-tindakan pemerintah dalam menetapkan sejarah yang telah diverifikasi sekaligus metode-metode yang dapat digunakan aparat di lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk mengantisipasi resiko perubahan wacana sejarah sekaligus mekanisme evaluasi terhadap sejarah yang telah berubah tersebut.

Setelah keputusan Walikota dan rancangan peraturan Walikota dapat dibangun di kota Dumai, maka pemerintah kota Dumai dapat menyusun dan menetapkan Peraturan daerah terkait sejarah bersama Dewan Perwakilan Daerah Kota Dumai. Peraturan Daerah tersebut merupakan regulasi tentang masyarakat adat kota Dumai yang memuat kategori masyarakat adat yang ada di kota Dumai berdasarkan verifikasi sejarah dan penetapan kawasan adat yang dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan sejarah yang ada.

Rencana rekomendasi Diskominfo sebagaimana diuraikan sebelumnya, menurut Kepala Diskominfo, kemungkinan akan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang sebagian besar akan dihentikan pelaksanaannya. Perubahan Kebijakan yang diformulasikan lebih lanjut akan lebih banyak berhubungan dengan upaya pelurusan sejarah, yakni ; Peninjauan kembali seluruh kawasan, cagar dan kawasan sejarah yang pernah ditetapkan oleh pemerintah maupun yang pernah dibiayai oleh pemerintah; Pemerintah Kota Dumai akan menerbitkan secara khusus sejarah Kota Dumai berdasarkan hasil temuan tim identifikasi tokoh sejarah dan ragam

temuan sebagaimana dipaparkan pada buku jejak buluh bohal yang ditulis oleh Freddy Hasiholan Sidauruk; Pemerintah Kota akan melakukan penyesuaian berbagai hal yang berkaitan dengan sejarah di Kota Dumai sebagai misal : Nama jalan, Informasi sejarah untuk publik yang dipaparkan dalam media pemerintah, Peninjauan adat istiadat dan aspek-aspek kebudayaan lokal lainnya (kearifan lokal) yang sesuai dengan sejarah yang telah ditemukan.

Dampak berupa kebijakan kebijakan akan menyebabkan pemerintah kota Dumai melalui instansi terkait wajib melakukan penyusunan alokasi anggaran baru untuk ada menghentikan alokasi anggaran yang disusun kebijakan sebelumnya. Upaya penyusunan anggaran baru ini dilakukan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan anggaran untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan baru yang terbangun oleh adanya upaya pelurusan sejarah Kota Dumai. Sebaliknya penghentian anggaran dari kebijakan sebelumnya untuk mencegah kerugian negara lebih lanjut oleh sebab alokasi anggaran sebelumnya teralokasi pada kebijakan terkait sejarah yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Perumusan Rekomendasi yang direncanakan diskominfo dapat disimpulkan memiliki ruang lingkup yang luas dan dalam pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dengan dinas atau instansi lainnya dilingkungan pemerintah kota Dumai, misal Rancangan keputusan walikota tentang pembentukan tim evaluasi dan sosialisasi sejarah, memerlukan kerjasama dengan pihak peneliti, kalangan akademis, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat yang terkait dengan sejarah; Demikian juga dengan Rancangan keputusan walikota tentang penetapan sejarah kota dumai, memerlukan derjasama dengan Dinas pendidikan dan kebudayaan; begitu juga dengan rancangan berikutnya.

Mengkomunikasikan hasil studi

Kemampuan mengkomunikasikan adalah proses penyampaian informasi dari seseorang peneliti kepada pengguna (user) untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rumusan ini, seseorang disebut sebagai peneliti dan orang lain disebut sebagai pembuat kebijakan, sedangkan informasi adalah isi rekomendasi yang disusun oleh peneliti kebijakan, serta manfaat tersebut diasumsikan sebagai pelaksanaan kebijakan dalam rangka menyelesaikan suatu persoalan tersebut.

Rencana Pemerintah Kota Dumai mensosialisasikan usulan kebijakan sejarah pra kemerdekaan RI di Kota Dumai tersebut, ber-

dasarkan wawancara dengan kasikominfo akan dilakukan dengan cara : menerbitkan buku Sejarah Kota Dumai secara resmi yang isinya dapat diverifikasi sesuai dengan sumber sejarah yang ada dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosialisasi hasil-hasil temuan sejarah dari tim dan penulis buku jejak buluh bohal, jika ketersediaan anggaran memungkinkan untuk dilaksanakan sesegera mungkin. Rencana Pemerintah Kota Dumai untuk menerbitkan buku sejarah secara resmi baru dapat dilakukan jika telah terdapat kesepakatan dan perjanjian kerjasama antara pemerintah kota dumai dengan penulis buku, sebab wacana sejarah terkait kota dumai yang dapat diverifikasikan kebenarannya hanya ada dalam buku tersebut. Kajian-kajian terkait kota dumai sebelumnya masih memiliki banyak permasalahan jika dirujuk berdasarkan verifikasi kebenaran dari kisah sejarah yang disampaikan oleh kajian-kajian tersebut. Kemudian fasilitasi kegiatan-kegiatan sosialisasi hana dapat dilaksanakan jika kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan sebagaimana tersebut sebelumnya telah terealisasi, khususnya pada rekomendasi terkait keputusan walikota.

Dalam mengkomunikasikan hasil studi yang menjadi formulasi kebijakan di Diskominfo, pemerintah Kota Dumai perlu melakukan langkah-langkah sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Sesuai dengan wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan upaya yang dilakukan pemerintah kota Dumai dengan menerbitkan buku dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi hasil temuan sejarah merupakan salah satu langkah implementasi tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik yang terdapat di Dinas Kominfo. Salah satu tupoksi yang terkait dengan hal ini berdasarkan peraturan walikota tentang tugas pokok dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika Kota Dumai yang menyebutkan bahwa bidang tersebut memiliki tugas dalam hal “penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;”

KESIMPULAN

Formulasi kebijakan sejarah Pra Kemerdekaan RI di Kota Dumai sudah berjalan, namun belum dapat disosialisasikan karena faktor sistem penganggaran pada pemerintahan. Formulasi kebijakan mengenai pelurusan sejarah perlu menjadi titik perhatian bagi seluruh pihak terkait khususnya dikalangan pemerintah dalam berbagai birokrasi di Kota Dumai maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, sebab permasalahan dikota Dumai ini bukan tidak mungkin terjadi dikota lainnya. Pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat mengevaluasi kembali sistem kebijakan yang ada khususnya mengenai sistem penganggaran agar pemerintah daerah dapat responsive dan adaptif terhadap ragam persoalan atau isu fenomenal yang dapat muncul kapan saja dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta
- Andhika, Lesmana Rian. 2019. Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah, *Jurnal Riset Pembangunan*, Vol. 2, No. 1.
- Asmara, Anugerah Yuka. 2016. Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia, *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 1, No. 1,.
- Arwildayanto & Arifin Sukung, Warni Tune Sumar. 2018, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Budi Winarno. 2001. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Danim, Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 1998. *Analisis Kebijaksanaan Publik, Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah*. Yogyakarta: Hanindita.
- Edi Suharto, 2010, *Analisa Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Publik*, Bandung:Alfabeta.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Teori dan Konsep Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Mustopadidjaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sidauruk, Freddy Hasiholan. 2022. *Jejak Waris Buluh Bohal Negeri Bukit Batu*, Salinan Terbatas (unpublished)
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Wahab, Solochin Abdul, 1991, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Impleentasi Kebijakan Negara*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Yulianto, Kadji. 2015, *Formulasi dan Implementasi Kebijaksanaan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.